

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN KETEPATAN
WAKTU TERHADAP KINERJA ANGGARAN
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)**

Prasetyo¹⁾, Kennedy²⁾, Nama Pipin Kurnia²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

Email : Prraasetyo.01@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of accountability, transparency, and timeliness on budget performance at OPD in Pekanbaru City. The population is all OPD in Pekanbaru City. The sampling technique used purposive sampling method with a total sample of 81 subjects. The data collection technique used in this research is a questionnaire. The data analysis technique used is multiple regression. The results showed that the variables of accountability (X_1) has a positive effect on the performance of the budget, with a value of $t_{count} > 4.142$ $t_{table} 1.991$ or $sig\ 0.000 < 0.05$. Variable transparency (X_2) has a positive effect on the performance of the budget with $t_{value} 2,551 > t_{table} 1.991$ or $sig\ of\ 0.013 < 0.05$ so. Variable timing (X_3) effect on the performance of the budget, with a value of $t > 2,215$ $t_{table} 1.991$ or $sig\ of\ 0.030 < 0.05$.

Keyword : Akuntabilitas, Transparansi dan Ketepatan Waktu terhadap Kinerja Anggaran

PENDAHULUAN

Kinerja anggaran merupakan wujud dari penyempurnaan sistem penganggaran tradisional dengan pendekatan yang lebih sistematis dan rasional, artinya sistem penganggaran yang dikelola berorientasi pada elemen indikator kinerja dalam proses penyusunan anggaran, sehingga setiap program/kegiatan harus memiliki tujuan dan sasaran yang terukur, baik *input, process, output, outcome*, dan *impact* (Windayani, 2008). APBD dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja anggaran pemerintah daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah daerah harus melakukan

optimalisasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimaksudkan untuk optimalisasi anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011, Kinerja anggaran diukur dari penyerapan anggaran yang merupakan konsistensi antara perencanaan dan implementasi. Maka kinerja anggaran di Provinsi Riau dapat dikatakan belum baik, karena penyerapan anggaran yang masih sedikit sejak tanggal disahkannya APBD. Keterkaitan antara anggaran dan realisasi memberikan gambaran apakah daerah tersebut dapat dikatakan efisien atau tidak, dalam pengambilan keputusan

penganggaran dan pembiayaan anggaran selama satu tahun anggaran tersebut.

Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran yaitu, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sistem pertanggungjawaban publik yang dimaksudkan dalam proses penganggaran dimulai dari proses perencanaan, proses penyusunan dan pelaksanaannya diwajibkan dapat disajikan dan dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Tidak berfungsinya pelaksanaan sistem akuntabilitas dengan baik oleh pemerintah merupakan cermin dari adanya indikasi bahwa terdapat penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintahan yang tidak ingin diketahui oleh publik (Basri, 2014:14). Senada dengan akuntabilitas, transparansi dalam pelaksanaannya juga digunakan dalam menjaga kepercayaan terkait dengan anggaran yang akan dikelola (Rawlin, 2008:21).

Selain akuntabilitas, transparansi menjadi faktor lain yang mempengaruhi kinerja anggaran. Transparansi yaitu mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relevan atau laporan yang terbuka pada pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan (Haryatmoko, 2011:112). Secara khusus, Heald (2012) menunjukkan bahwa gagasan inti dari transparansi terkait tentang pengeluaran publik yang pembuatannya bertumpu dari fakta di lapangan serta mudah dipahami oleh masyarakat.

Faktor selanjutnya yaitu ketepatan waktu. Sebuah anggaran

dituntut juga dalam halnya ketepatan waktu dimana diharapkan adanya komunikasi informasi secara lebih awal, untuk menghindari adanya keterlambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan dalam menyusun anggaran. Informasi yang disampaikan tepat waktu dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Baridwan, 2009;15).

Adanya ketidakkonsistenan pada beberapa penelitian terdahulu, menjadi motivasi dilakukannya pengujian ulang pada OPD di Kota Pekanbaru, yang tidak lepas dari masalah akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal agar dengan semakin besarnya tuntutan untuk mengembangkan organisasinya secara efisien dan efektif, sehingga memberikan pelayanan publik dengan baik.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Laoli (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dipenelitian ini penulis menambahkan variabel ketepatan waktu sebagai variabel independen, variabel ini ditambahkan dari penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018). Perbedaan juga terletak pada lokasi penelitiannya dan tahun penelitian. Penelitian ini dilakukan pada OPD di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian yang terdahulu hanya menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel independen dan lokasi penelitian pada OPD Kabupaten Nias

Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Lembaga Administrasi Negara, 2011). Jika pemerintah bertanggung jawab terhadap anggaran didaerahnya maka pemerintah mampu memberikan hasil pelaporan keuangan sesuai dengan yang diharapkan, dengan hasil pelaporan keuangan yang baik ini maka hasil kinerja anggaran yang diperolehpun bagus. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja anggaran, dengan adanya pertanggungjawaban ini pemerintah akan membuat anggaran yang baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. Akuntabilitas juga dapat meminimalisir pemerintah melakukan kecurangan, mulai dari penganggaran hingga pelaksanaannya. Semakin tinggi penerapan akuntabilitasnya maka semakin tinggi pula kinerja anggarannya.

Hal ini menegaskan dengan

adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal.

Hasil penelitian Wandari, Sujana dan Adi Putra (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada OPD. Begitu juga dengan penelitian Premananda dan Latrini (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada OPD. Sedangkan Cindy (2018) menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

2. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran

Kebijakan dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah merupakan hal yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran. Garini (2011), yang menyatakan bahwa transparansi (keterbukaan) dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja anggaran untuk menghasilkan anggaran yang diharapkan. Jadi semakin transparan penyusunan hingga pelaksanaan anggaran tersebut itu maka masyarakat lebih mudah dalam memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Dengan adanya transparansi pemerintah akan menyusun dan melaksanakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan anggaran yang baik dapat menekankan pada penggunaan prinsip transparansi untuk dapat memastikan dalam pemanfaatan sumber daya telah

didistribusikan secara benar sehingga tidak disalahgunakan hal ini juga dapat meningkatkan kinerja anggaran yang dihasilkan. Heald (2012) menunjukkan bahwa gagasan inti dari transparansi terkait tentang pengeluaran publik yang pembuatannya bertumpu dari fakta di lapangan serta mudah dipahami oleh masyarakat. Transparansi dapat diartikan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulya (2014) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Hasil penelitian Wandari, Sujana dan Adi Putra (2015) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada OPD. Sedangkan hasil penelitian Astuti (2013) transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

3. Pengaruh Ketepatan Waktu terhadap Kinerja Anggaran

Sebuah anggaran dituntut juga dalam halnya ketepatan waktu dimana diharapkan adanya komunikasi informasi secara lebih awal, untuk menghindari adanya keterlambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan dalam menyusun anggaran. Informasi yang disampaikan tepat waktu dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Baridwan, 2009:15). Yahya & Putra (2012), yang menunjukkan bahwa ketepatan jadwal penyusunan anggaran berpengaruh terhadap

kinerja anggaran.

Tindakan penyalahgunaan pengelolaan anggaran sering terjadi karena kurang adanya ketepatan waktu dalam pelaporan pengelolaan anggaran. Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi (Bandi, 2010). Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu maka akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Jika dalam sebuah anggaran daerah mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, maka semakin tinggi pula kinerja anggaran.

Penelitian Wandari, dkk (2015) yang menyatakan bahwa ketepatan waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran. Begitu juga dengan penelitian Premananda dan Latrini (2017) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada OPD.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh OPD di Kota Pekanbaru. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah sampel dibatasi hanya OPD yang membuat Laporan Keuangan Daerah yaitu :

1. Seluruh OPD yang ada di Kota Pekanbaru
2. OPD yang membuat Laporan

Keuangan Daerah

3. Masing-masing OPD diambil 4 orang untuk menjadi sampel yang terdiri dari Kepala Dinas/Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Anggaran, Kasubag. Keuangan dan Bendaharawan, sehingga diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 124 orang

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. Variabel Dependen (Y) adalah Kinerja Anggaran yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber dana. (Deputi pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan, 2005 : 10). Adapun indikatornya adalah *Job Description*, Perencanaan, Waktu, Kewajaran, Kapabilitas, Sasaran, Pengawasan. (Asrida,2012). Variabel independennya yaitu akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan waktu.

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada publik atas kinerja yang telah dilakukan. Terdapat empat unsur akuntabilitas publik yang harus dipenuhi, diantaranya adalah akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan. Adapun indikator dari akuntabilitas publik adalah (Putra, 2013) yaitu

1. Pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas.
2. Anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik.
3. Program-program anggaran

dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal.

4. Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik.
5. Pelaksanaan program-program APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
6. Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan.
7. Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku
8. Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku.
9. Audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan (Loina, 2010 : 7). Indikator transparansi adalah : Komunikasi, Keterbukaan, Transparansi beralasan, Aksesabilitas, Informasi, Pertanggung-jawaban, Publikasi, *Time lines*, Pengaduan, Partisipasi. Ketepatan waktu adalah ketepatan jadwal penyusunan anggaran Indikatornya adalah: Informasi yang disampaikan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi (Winardi, Sujana dan Putra, 2015), yaitu:

1. Informasi dapat digunakan untuk menghindari tertundanya

- pengambilan keputusan
2. Informasi yang disampaikan lengkap
 3. Informasi yang disampaikan akurat
 4. Informasi yang disampaikan sesuai jadwal

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan, dimana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen (tergantung) dan variabel independen (bebas) yang dibantu dengan program SPSS (*Statistical Program For Social Science*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran penyebaran dan pengembalian kuesioner dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

| Keterangan | Jumlah |
|--|---------------|
| Jumlah kuesioner yang disebar | 124 |
| Jumlah kuesioner yang kembali | 84 |
| Jumlah kuesioner yang tidak dapat dipergunakan | 2 |
| Jumlah kuesioner yang dapat dipergunakan | 82 |
| Respon rate | 66,13% |

Sumber: *Data Olahan 2020*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam penelitian hanya 84 Pegawai OPD yang turut mengisi kuesioner penelitian dan terdapat 2 kuesioner yang tidak digunakan dikarenakan tidak lengkap diisi oleh responden. Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa dari 124 kuesioner yang disebar,

yang tidak mengembalikan ada 40 kuesioner dan 2 kuesioner yang tidak digunakan dikarenakan tidak lengkap diisi oleh responden. Maka respon rate adalah 66,13%

Hasil Statistik Deskriptif

Merupakan gambaran tentang ringkasan data dari masing-masing variabel yang akan masuk dalam proses pengujian, tujuannya adalah untuk memudahkan dalam memahami data, dimulai dari jumlah data (N), Nilai Rata-Rata (Mean), Nilai Maksimum, Nilai Minimum, dan Standar Penyimpangan Data (Std Deviasi).

Tabel 2 Hasil Deskriptif Statistik

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|-------|-------|---------|---------|
| | N | Min | Max | Mean | SD |
| Kinerja Anggaran | 82 | 2,429 | 5,000 | 3,75087 | ,642734 |
| Akuntabilitas | 82 | 3,333 | 5,000 | 4,17073 | ,409904 |
| Transparansi | 82 | 3,000 | 5,000 | 3,99634 | ,425265 |
| Ketepatan Waktu | 82 | 2,000 | 5,000 | 3,54146 | ,722470 |
| Valid N (listwise) | 82 | | | | |

Sumber: *Data Olahan 2020*

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel kinerja anggaran terdiri dari 7 pernyataan yang diukur menggunakan skala likert 5 poin memiliki nilai maksimum 5,000, minimum 2,429, nilai rata-rata 3,75087, dan standar deviasi 0,642734. Variabel akuntabilitas terdiri dari 9 pernyataan yang diukur menggunakan skala likert 5 poin memiliki nilai maksimum 5, minimum 3,333, nilai rata-rata 4,17073, dan standar deviasi 0,409904. Variabel transparansi terdiri dari 10 pernyataan yang diukur menggunakan skala likert 5 poin memiliki nilai maksimum 5,000, minimum 3,000, nilai rata-rata 3,99634, dan standar deviasi 0,425265. Variabel ketepatan waktu terdiri dari 5 pernyataan yang diukur menggunakan skala likert 5 poin memiliki nilai maksimum 2,0000

minimum 5,000, nilai rata-rata 3,54146 dan standar deviasi 0,722470.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Pada dasarnya analisis regresi digunakan untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukkan perubahan satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah.

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | | | |
| 1 (Constant) | -1,139 | ,550 | | -2,072 | ,042 |
| Akuntabilitas | ,607 | ,147 | ,387 | 4,142 | ,000 |
| Transparansi | ,412 | ,161 | ,272 | 2,551 | ,013 |
| Ketepatan waktu | ,201 | ,091 | ,226 | 2,215 | ,030 |

a. Dependent Variable: Kinerja anggaran

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -1,139 + 0,607X_1 + 0,412X_2 + 0,201X_3 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut, maka dapat dilihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap kinerja anggaran. Penjelasan pengaruh masing-masing variabel berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas adalah:

1. Nilai konstanta (*intercept*) sebesar 1,139, hal ini menunjukkan bahwa jika variabel akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), ketepatan waktu (X_3) bernilai 0 (nol) maka kinerja anggaran (Y) bernilai -1,139.

2. Nilai koefisien regresi (β_1) untuk variabel akuntabilitas (X_1), sebesar 0,607 (bernilai positif). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah, yang berarti semakin meningkatnya akuntabilitas seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya, maka akan meningkatkan kinerja anggaran (Y).
3. Nilai koefisien regresi (β_2) untuk variabel transparansi (X_2) sebesar 0,412 (bernilai positif). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah, yang berarti semakin tinggi transparansi seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya, maka akan meningkatkan kinerja anggaran (Y).
4. Nilai koefisien regresi (β_3) untuk variabel ketepatan waktu (X_3) sebesar -0,201 (bernilai positif). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah, yang berarti semakin tinggi ketepatan waktu seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya, maka akan meningkatkan kinerja anggaran (Y).

Hasil Uji statistik t (Uji Parsial)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara parsial menggunakan uji statistik t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran

(H₁)

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel akuntabilitas (X_1) dengan nilai t_{hitung} $4,142 > t_{tabel} 1,991$ atau sig sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dinyatakan diterima, yang berarti bahwa variabel akuntabilitas (X_1) berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dengan demikian semakin meningkatnya akuntabilitas seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya, maka akan meningkatkan kinerja anggaran.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2011) akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas juga dapat meminimalisir pemerintah melakukan kecurangan, mulai dari penganggaran hingga pelaksanaannya. Semakin tinggi penerapan akuntabilitasnya maka semakin tinggi pula kinerja anggarannya

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandari, Sujana dan Adi Putra (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada OPD. Begitu juga dengan penelitian Premananda dan Latrini (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada OPD. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Cindy (2018) menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran

Hal ini menegaskan dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal. Jika pemerintah bertanggung jawab terhadap anggaran didaerhahnya maka pemerintah mampu memberikan hasil pelaporan keuangan sesuai dengan yang diharapkan, dengan hasil pelaporan keuangan yang baik ini maka hasil kinerja anggaran yang diperolehpun bagus. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja anggaran, dengan adanya pertanggungjawaban ini pemerintah akan membuat anggaran yang baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat

2. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran (H₂)

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel transparansi (X_2) dengan nilai t_{hitung} $2,551 > t_{tabel} 1,991$ atau sig sebesar $0,013 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dinyatakan diterima, variabel transparansi (X_2) berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran

maka semakin tinggi transparansi seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya, maka akan meningkatkan kinerja anggaran.

Menurut Garini (2011), yang transparansi (keterbukaan) dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja anggaran untuk menghasilkan anggaran yang diharapkan. Heald (2012) menunjukkan bahwa gagasan inti dari transparansi terkait tentang pengeluaran publik yang pembuatannya bertumpu dari fakta di lapangan serta mudah dipahami oleh masyarakat. Transparansi dapat diartikan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Penelitian yang dilakukan oleh Mulya (2014) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Hasil penelitian Wandari, Sujana dan Adi Putra (2015) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada OPD. Namun tidak mendukung hasil penelitian Astuti (2013) yang membuktikan transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

Berdasarkan hasil tersebut maka dengan adanya transparansi pemerintah akan menyusun dan melaksanakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan anggaran yang baik dapat menekankan pada penggunaan prinsip transparansi untuk dapat memastikan dalam pemanfaatan sumber daya telah didistribusikan secara benar sehingga tidak disalahgunakan hal ini juga dapat meningkatkan kinerja anggaran yang

dihasilkan.

3. Pengaruh Ketepatan Waktu terhadap Kinerja Anggaran (H₃)

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel ketepatan waktu (X_3) dengan nilai $t_{hitung} 2,215 > t_{tabel} 1,991$ atau sig sebesar $0,030 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dinyatakan diterima, variabel ketepatan waktu (X_3) berpengaruh terhadap kinerja anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketepatan waktu seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya, maka akan meningkatkan kinerja anggaran.

Menurut Baridwan (2009: 15) sebuah anggaran dituntut juga dalam halnya ketepatan waktu dimana diharapkan adanya komunikasi informasi secara lebih awal, untuk menghindari adanya keterlambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan dalam menyusun anggaran. Informasi yang disampaikan tepat waktu dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Hal senada juga diungkapkan Bandi (2010) bahwa tindakan penyalahgunaan pengelolaan anggaran sering terjadi karena kurang adanya ketepatan waktu dalam pelaporan pengelolaan anggaran. Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Penelitian Wandari, dkk (2015) yang menyatakan bahwa ketepatan waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran. Begitu juga dengan penelitian Premananda dan Latrini (2017) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada OPD.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu maka akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Jika dalam sebuah anggaran daerah mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, maka semakin tinggi pula kinerja anggaran.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini *adjusted R²* digunakan untuk menggambarkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dan tidak terpaku pada R^2 karena R^2 memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan pada model. Hasil dari uji koefisien determinasi disajikan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4 Uji Koefisien Determinan (R^2)

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,765 ^a | ,585 | ,565 | 1,420 |

a. Predictors: (Constant), Ketepatan waktu, Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Kinerja anggaran

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa *adjusted R square* sebesar 0,585 yang menjelaskan bahwa variabel-variabel independen yang terdiri dari variabel ketepatan waktu, transparansi, dan akuntabilitas dapat menjelaskan 58,5% variabel dependenyaitu kinerja anggaran. Artinya variabel dependen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama yaitu sebesar 58,5% sedangkan sisanya yaitu sebesar 41,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan kata lain terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran selain dari variabel yang diteliti.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran dengan nilai koefisien bertanda positif yang berarti, bahwa semakin baik akuntabilitas maka akan mengakibatkan semakin baiknya kinerja anggaran. Begitu pula sebaliknya, jika semakin buruk akuntabilitas maka akan mengakibatkan kinerja anggaran yang tidak baik.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan

transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran dengan nilai koefisien bertanda positif yang berarti, bahwa semakin transparansi seseorang dalam bekerja maka akan mengakibatkan tingkat kinerja anggaran yang semakin baik. Begitu pula sebaliknya, jika semakin buruk transparansi maka akan mengakibatkan kinerja anggaran yang semakin rendah.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan ketepatan waktu berpengaruh terhadap kinerja anggaran dengan nilai koefisien bertanda positif yang berarti, bahwa semakin baik ketepatan waktu maka akan mengakibatkan kualitas kinerja anggaran yang dibuat semakin baik. Begitu pula sebaliknya, jika semakin rendah ketepatan waktu maka akan mengakibatkan tingkat kinerja anggaran yang semakin buruk

Saran

1. Diharapkan bagi pihak pimpinan OPD untuk memberikan pelatihan atau pendidikan terhadap para pegawai guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan ketepatan waktu dalam bekerja, agar minimalisasi permasalahan kinerja anggaran OPD Provinsi Riau
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel atau dengan menambah ruang lingkup objek penelitian, karena dalam penelitian hanya melibatkan subjek dari OPD Provinsi Riau sehingga diperlukan pembuktian

yang lebih luas agar dapat mewakili populasi lain yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrida. 2012. *Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran*. Jurnal Kebangsaan. Vol.1 No.1, Januari 2012 ISSN: 2089-5917.
- Astuti, Ratih Muji. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (DDPKAD) Kabupaten Grobogan)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Baridwan, Zaki. 2009. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: BPFE.
- Bandi. Santoso T. Hananto. 2010. *Ketepatan waktu atas Laporan Keuangan Perusahaan Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi III. pp 66-77.
- Cindy, A., Salle, A., & Rante, A. 2018. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Jayapura)*. *JOM Fekon*, 13,68-82
- Garini, Nadia. 2011. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas*

- Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung*. Bandung : FE UNIKOM
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building.
- Heald, D. A. 2012. Why is Transparency About Public Expenditure so Elusive?. *International Review of Administrative Sciences*, 78 (1), pp: 30–49.
- Laoli, Victorinus. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value of Money pada Pemerintah Kabupaten Nias*. Jurnal. Politeknik Ganesha, Medan.
- Lestari, Novi. 2018. *Pengaruh Akuntabilitas, Ketepatan Waktu dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Dalam Konsep Value For Money Pada Puskesmas Kota Palembang*. Tesis. Politeknik Negeri Sriwijaya, Sumatera Selatan.
- Loina Lalolo Krina P. 2010. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Bappenas, Jakarta
- Mulya Rezky, Anugriani. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Bone*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Premananda, Ni Luh Putu Uttari dan Ni Made Yenni Latrini, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar*, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.18.3. Maret (2017): 2451-2476, ISSN: 2302-8556
- Putra, Deki, 2013, *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*, *Artikel Ilmiah*, Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang
- Rawlin, B. L. 2008. *Measuring the Relationship Between Organizational Transparency and Employee Trust*. *Public Relations Journal*, 2(2), pp: 1-21.